

PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)

Armaja¹, Ridwan Ibrahim², Aliamin³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

^{2,3}Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

E-mail: ¹armaja.angkup@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of regional wealth, balancing funds, and regional expenditures on the district's financial performance in Aceh, Indonesia. The population of this study is all 23 districts/cities in Aceh from the period 2011 to 2015 with the 115 total number of observations. The data used in this research is secondary data, comprising data of Revenue and Expenditure Budget of Districts/City-Revision (APBK-P). The analysis method used in this study is the Multiple Linear Regression Analysis. The study found that the regional wealth, balancing funds, and regional expenditures significantly affected the financial performance of districts/cities in Aceh.

Keywords: *Regional Wealth, Balancing Funds, Regional Expenditures, Financial Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015 yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota sehingga jumlah pengamatan sebanyak 115 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota-Perubahan (APBK-P) 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 2011-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

Kata Kunci: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005).

Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun kenyataan di pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut Dana Perimbangan. Hal ini sering dijumpai bahwa DAPER masih jauh lebih besar dari PAD (Kusumawardani, 2012).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor pertama yaitu kekayaan daerah, diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa PAD. PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kekayaan daerah untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan adalah (Retnowati, 2016), (Pratama et al, 2015), (Minarsih, 2015), dan (Kusumawardani, 2012). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Faktor kedua yaitu Dana Perimbangan. (Patrick, 2007) mengartikan dana perimbangan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia mengakibatkan kewenangan yang begitu luas diserahkan ke daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan. Diperlukan adanya dana pusat yang

diserahkan ke daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal. Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dana perimbangan untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan adalah (Masdiantini dan Erawati, 2016; Retnowati, 2016; Minarsih, 2015; Simanullang, 2013; Manik, 2013; dan Sesotyanyngtyas, 2012). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Faktor ketiga yaitu belanja daerah. Pratama et al, (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel belanja daerah untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan adalah Retnowati (2016), Pratama, et al, (2015). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis terkait kinerja keuangan.

TINJAUAN TEORITIS

Kinerja Keuangan

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Mulyadi (2004: 79) membagi ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat,

yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Lebih lanjut, Mulyadi (2004: 79) mengungkapkan bahwa “Pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya”. Menurut Mardiasmo (2004:25), dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007).

Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta

menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Setyaningrum, 2012). Adi (2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Tingkat kekayaan daerah ini diproksikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal (Cahyat, 2004).

UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam

menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan dihitung dengan perbandingan antara dana perimbangan dengan total pendapatan.

Belanja Daerah

PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 27 PP No.58/2005, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Darise (2008: 39) “Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”. Lebih lanjut Mahmudi (2006: 155) menjelaskan bahwa belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (pasal 31 Permendagri No.13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015, yang berjumlah 23 Pemda dan terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 23 Kabupaten/Kota akan diamati selama 5 periode (2011-2015) sehingga jumlah pengamatan sebanyak 115 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang digunakan peneliti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh. Dokumen tersebut merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota-Perubahan (APBK-P) 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 2011-2015. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Analisis dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Metode analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dua tahap, yaitu rancangan pengujian hipotesis secara bersama-sama dan rancangan pengujian hipotesis secara terpisah.

Persamaan model empiris yang digunakan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: Y merupakan kinerja keuangan, X_1 merupakan kekayaan daerah, X_2 merupakan Dana Perimbangan, X_3 merupakan belanja daerah, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ merupakan Koefisien X_1, X_2, X_3 , α merupakan konstanta, dan ε merupakan error terms.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Observasi Penelitian

Unit analisis penelitian ini adalah Laporan Keuangan (*Audited*) Kabupaten/Kota di Aceh Periode 2011-2015. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 115 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang menyediakan data terhadap keempat variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Daerah. Setelah data diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya dilakukan pengujian statistik atas data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Statistik Deskriptif

Deskriptif data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil deskriptif data penelitian untuk Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah LKPD Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011-2015

	Kekayaan Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Kinerja Keuangan
N Valid	115	115	115	115
Missing	0	0	0	0
Mean	56,093,638,258.6285	561,479,622,185.0640	727,813,398,206.5973	94,6523
Std. Deviation	49,700,533,351.10590	205,794,554,042.72705	310,909,491,814.80810	8,62522
Minimum	6,099,446,461.29	141,529,354,000.00	292,902,595,170.39	62,53
Maximum	231,285,642,858.14	1,282,327,445,360.00	1,955,087,093,697.11	132,23

Sumber: Data Sekunder/LKPD, diolah (2017).

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

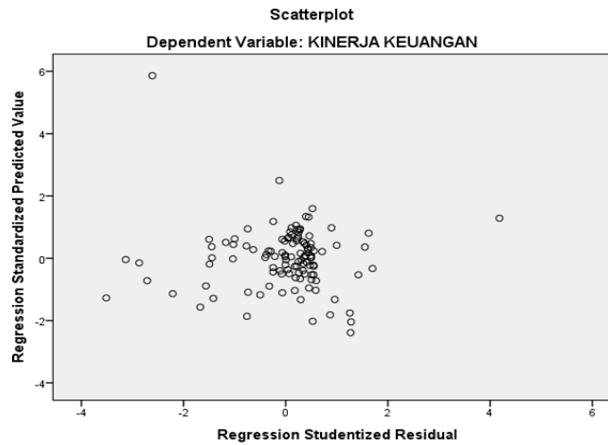
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kekayaan Daerah	0,267	3,742
Dana Perimbangan	0,157	6,387
Belanja Daerah	0,092	10,820

Sumber: Data Primer diolah (2017).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel kekayaan daerah dan Dana Perimbangan $> 0,10$ yang berarti bahwa tidak ada multikolinieritas antar kedua variabel independen tersebut, namun untuk variabel belanja daerah, nilai *tolerance* berada $< 0,10$, yang artinya terjadi multikolinieritas terhadap variabel belanja daerah. Sementara itu, hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel kekayaan daerah dan Dana Perimbangan memiliki nilai VIF < 10 , hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinieritas, namun untuk variabel belanja daerah, nilai VIF > 10 , yang artinya terjadi multikolinieritas terhadap variabel belanja daerah.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

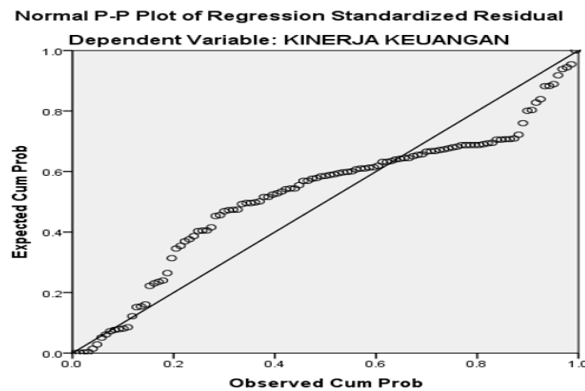
Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu pada grafik, oleh karena itu data tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1
Hasil Uji Heterokedastisitas

3. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah grafik penyebaran P-Plot. Berdasarkan hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients (B)
(Constant)	96,335
Kekayaan Daerah	-7,999
Dana Perimbangan	-2,875
Belanja Daerah	2,603
Persamaan Regresi $Y = \alpha - \beta X_1 - \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$	
$Y = 96,335 - 7,999X_1 - 2,875X_2 + 2,603X_3$	
R = 0,334	
R ² = 0,112	

PEMBAHASAN

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,334 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0,334. Artinya kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan sebesar 33,4%. Pengaruh secara bersama-sama juga dapat dilihat dari perolehan nilai R^2 sebesar 0,112 atau 11,2%. Pengaruh sebesar 11,2% tersebut bermakna bahwa kinerja keuangan secara bersama-sama dipengaruhi oleh kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah sebesar 11,2%, sisanya sebesar 88,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi β_1 adalah -7,999, nilai tersebut menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya jika kekayaan daerah meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan menurun sebesar Rp7,999. Diperoleh hubungan negatif kekayaan daerah dengan kinerja keuangan. Hal ini bermakna bahwa penerimaan kekayaan daerah oleh Pemda tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pengaruh negatif PAD terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemda, maka akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan kekayaan yang besar, sehingga berdampak buruk atau penurunan penilaian pada kinerja keuangan (Kusumawardani, 2012). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahim (2008) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Takalar.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi β_2 adalah -2,875, nilai tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya jika Dana Perimbangan meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan menurun sebesar Rp2,875. Diperoleh hubungan negatif Dana Perimbangan dengan kinerja keuangan. Hal ini bermakna bahwa penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemda tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh diatur menurut UU No. 33 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 19 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat (Susilawati, 2016) yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pengaruh negatif yang dihasilkan dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian (Ebit et al, 2012) yang membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Selain itu, Elychia (2014) dan Aziz (2014) juga membuktikan hasil yang sama dimana variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi β_3 adalah 6,603, nilai tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya jika belanja daerah meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar Rp6,603. Diperoleh hubungan positif belanja daerah dengan kinerja keuangan. Hal ini bermakna bahwa belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Secara teori, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga kinerja pemerintah (Pratama et al, 2015).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Retnowati (2016) dan Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang membuktikan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Pengaruh yang dihasilkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menghasilkan pengaruh yang positif.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

REFERENSI

- Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Aziz, A. Q. (2014). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Budiarto, B. (2007). *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. *Center for International Forestry Research*. 3, 1-8.
- Darise, N. (2008). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.
- Ebit J., Darwanis dan Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. 1 (1), 1-15.
- Elychia, R. P. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012)*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Halachmi, A. (2005). *Performance Measurementis only one Way of Managing Performance*. *International Journal of Productivity and Performance Management*. 54, 502-516.
- Kusumawardani, M. (2012). *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.

- Mahmudi.(2006). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan. Yogyakarta: YKPN.
- Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 9 (2),107-124.
- Mardiasmo.(2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi ke-2, Yogyakarta: ANDI.
- Masdiantini, P. R., dan N. M. A. Erawati. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14 (2), 1150-1182.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Mulyadi.(2004). *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat & Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikarini, W. A.dan D. Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Patrick, P. A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8,2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No.AAT3266180).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti, dan E. Sujana. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (1), 1-12.

- Rahim, S. (2008). *Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*. Diambil kembali dari Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3206701711.pdf.
- Retnowati, R. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. 1 (1), 1-4.
- Setyaningrum, D. dan F. Syafitri.(2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 9 (2), 154-170.
- Simanullang, G. (2013). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. *Umrah Journal of Accounting*. 1 (1), 1-24.
- Susilawati, P. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*.